

Mengarusutamakan Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Pembangunan di Desa Sidoharjo, Polanharjo, Klaten

Wahyu Dwi Saputra^{1*}, Gembong Hanung²

¹Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 28 Agustus 2023; Direvisi: 25 September 2023; Disetujui: 5 November 2023

Abstract

People with disabilities are a socially, economically and politically vulnerable group. Even though their existence has been recognized in global norms such as the Sustainable Development Goals (SDGs), their role in development is still often perpetuated as objects rather than subjects of development. This study aims to understand how far the SDGs manifested in the "Inclusion Village" program and other government programs are able to represent the actual needs of persons with disabilities in Sidoharjo Village, Polanharjo, Klaten. Data obtained through qualitative interviews with five persons with disabilities in Sidoharjo Village show that there is indeed a gap between the local context and the global standards of the SDGs. This means that various programs based on inclusivity are still not understood and their impact is not felt by persons with disabilities. The findings in this research indicate that people with disabilities in Sidoharjo Village have not been well-placed as subjects of development. Eventually, there are unfulfilled rights in regard to health, education, welfare and equality services.

Keywords: People with disabilities; Inclusive villages; Community empowerment

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun keberadaannya telah diakui di dalam norma global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), perannya di dalam pembangunan masih kerap dilanggengkan sebagai objek alih-alih subjek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami seberapa jauh SDGs yang termanifestasi di dalam program "Desa Inklusi" dan program pemerintah lainnya mampu merepresentasikan kebutuhan aktual dari penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo, Polanharjo, Klaten. Data yang diperoleh melalui wawancara kualitatif dengan lima penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara konteks lokal dan standar global dari SDGs. Artinya, berbagai program berbasis inklusivitas masih belum dipahami dan dirasakan dampaknya oleh penyandang disabilitas. Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo belum ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Hal ini berimbas pada tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas atas layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kesetaraan.

Kata Kunci: Penyandang disabilitas; Desa inklusi; Pemberdayaan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah kerangka pembangunan global, Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan penyandang disabilitas ke dalam tujuh belas tujuan pembangunannya, terutama yang menyangkut dengan pendidikan, pertumbuhan, dan pengurangan kesenjangan. Pendekatan holistik yang ada di dalam SDGs secara eksplisit menjanjikan adanya inklusi sosial atau "development for all" di dalam agenda-agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk bagi penyandang disabilitas (*Department of Economic and Social Affairs, n.d.*). Akan tetapi, implementasi SDGs tidaklah lepas dari kritik. "Leaving no one behind" yang menjadi landasan inklusif SDGs membutuhkan sensitivitas terutama mengenai keberadaan penyandang disabilitas. Mengikuti pendapat Mahadi (2021), dibutuhkan sensitivitas terhadap dinamika-

ISSN 3025-633X (print), ISSN 3025-6747 (online)

*Penulis korespondensi: Wahyu Dwi Saputra

Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Jl. Flora Bulaksumur No.1, Kocoran, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: wahyu.dwi.s@ugm.ac.id

Copyright © 2023 Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna (Jurnal Parikesit)
This work is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

dinamika lokal (*local dynamics*) dalam implementasi SDGs terutama karena kerangka ini diturunkan dari standar-standar global. Berkaitan dengan penyandang disabilitas, dinamika lokal dapat dipahami sebagai konteks pembangunan apa saja yang telah melibatkan penyandang disabilitas, termasuk di level desa.

Di Desa Sidoharjo, pemerintah telah merekognisi keberadaan penyandang disabilitas. Penyebutan penyandang disabilitas di dalam dokumen resmi pemerintah adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kementerian Sosial Republik Indonesia (n.d.) secara eksplisit mendefinisikan PPKS sebagai entitas yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya karena suatu hambatan, kesulitan, ataupun gangguan. Melalui definisi ini, Pemerintah Desa Sidoharjo bersama dengan Tim Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan wawancara mendalam dengan lima subjek PPKS. Wawancara dilakukan pada tanggal 9–11 Juli 2023. Secara garis besar wawancara ini ditujukan untuk memperoleh informasi aktual mengenai kondisi dan kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dari kelima subjek PPKS. Informasi semacam ini penting mengingat penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang perannya dalam pembangunan sering kali terbatas dan terabaikan.

Terbatas dan terabaikannya penyandang disabilitas sebenarnya merupakan ironi setidaknya jika dilihat melalui dua level. Level pertama, SDGs yang telah terinstitusionalisasi ke dalam berbagai produk kebijakan nasional sebenarnya mengakui keberadaan penyandang disabilitas. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Bappenas, n.d.; Ghufron, 2022). Oleh karena itu, menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan sudah seharusnya dijalankan. Di level kedua, Desa Sidoharjo sendiri terletak di Kecamatan Polanharjo, kecamatan yang memperoleh Anugerah Prakarsa Inklusi oleh Komisi Nasional Disabilitas (Kominfo, 2022; Rahadi, 2022). Kedua level ini menunjukkan bahwa mengarusutamakan hak-hak penyandang disabilitas di dalam pembangunan merupakan sebuah urgensi, termasuk di Desa Sidoharjo.

Tabel 1. Data lima subjek PPKS

Subjek PPKS	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Kategori PPKS
A	Perempuan	18	Disabilitas sensorik
B	Perempuan	25	Disabilitas ganda (fisik dan mental)
C	Laki-Laki	23	Disabilitas ganda (fisik dan mental)
D	Perempuan	16	Disabilitas mental
E	Laki-Laki	8	Disabilitas sensorik

Salah satu permasalahan yang muncul di Desa Sidoharjo adalah bahwa agenda pembangunan masih belum sensitif terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Artinya, norma inklusivitas yang dijunjung tinggi di berbagai level pemerintah masih belum merepresentasikan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, menjadi sangat signifikan untuk menggali informasi mengenai kondisi dan kebutuhan aktual dari para penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo. Terlebih dalam kaitannya dengan SDGs, penting untuk juga membumikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Keberadaan Tim KKN-PPM UGM di Desa Sidoharjo telah menjadi agen yang mampu membumikan nilai-nilai SDGs, salah satunya dengan melakukan penjarangan data lewat wawancara kualitatif mendalam (*in-depth qualitative interview*) terhadap lima subjek PPKS. Wawancara ini dilakukan dengan mendatangi rumah para subjek PPKS dan mengajukan *open-ended questions* kepada anggota keluarga yang mendampingi subjek. Hasil dari

wawancara ini menjadi bahan untuk memetakan permasalahan, menawarkan solusi, dan mengajukan program-program asistensi dan pemberdayaan untuk subjek PPKS.

Kelima subjek PPKS tersebut tersebar di empat dusun di Desa Sidoharjo, yakni Dusun Demangan, Purwogondo, Ploso, dan Tlobong. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat kategorisasi yang digunakan untuk membagi penyandang disabilitas ke dalam kategori PPKS: disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda/multi. Penyandang disabilitas sensorik merupakan individu yang memiliki keterbatasan fungsi indera. Di Desa Sidoharjo, terdapat dua subjek PPKS (A dan E) yang merupakan penyandang disabilitas sensorik netra atau disabilitas penglihatan. Sementara itu, subjek D merupakan penyandang disabilitas mental. Kategori disabilitas ini merujuk kepada individu yang memiliki keterbatasan untuk menjalankan fungsi sosialnya sebagai akibat dari adanya gangguan pikir maupun emosi. Terakhir, terdapat dua subjek PPKS (B dan C) yang dikategorisasikan ke dalam penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas ini merupakan individu yang mengalami setidaknya dua dari hambatan fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Subjek B dan C merupakan penyandang disabilitas ganda, yakni mental dan fisik.

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukan wawancara kualitatif (*qualitative interview*) kepada lima subjek PPKS di Desa Sidoharjo. Wawancara kualitatif dilakukan oleh Tim KKN-PPM pada tanggal 9–11 Juli 2023. Mengikuti argumen Sheppard (2020), metode ini berguna untuk menjelaskan proses di balik sebuah fenomena sosial. Sheppard juga menekankan bahwa data yang diperoleh dari wawancara kualitatif memiliki karakter yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari narasumber. Mengingat bahwa narasumber di dalam penelitian ini adalah lima subjek PPKS, maka dalam proses wawancara kelimanya direpresentasikan oleh keluarga subjek masing-masing. Meskipun demikian, hasil dari wawancara ini masih tetap valid mengingat wawancara dilakukan untuk menjawab permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya dari subjek PPKS sehingga keluarga merupakan pihak yang relevan dan representatif. Daftar pertanyaan dan relevansinya terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar pertanyaan dan relevansinya dengan tiga poin di dalam SDGs

Poin SDG	Daftar pertanyaan terkait
SDG 3: kehidupan sehat dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah subjek PPKS telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)? - Bantuan ekonomi dan asistensi kesehatan apa saja yang telah diterima sampai saat ini? - Bagaimana kondisi ekonomi dan sosial dari keluarga pengampu?
SDG 4: pendidikan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus apa saja yang telah diterima sampai saat ini? - Bagaimana kemampuan subjek PPKS dalam mengembangkan potensi dirinya? - Bagaimana kemauan dan kesiapan fisik serta mental subjek untuk menerima pendidikan khusus?
SDG 10: pengurangan kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah subjek PPKS sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP)? - Bagaimana bentuk intervensi pemerintah terhadap keberadaan subjek PPKS?

Sebagai bagian dari studi kualitatif, penelitian ini sarat dengan tradisi interpretivis. Artinya, subjektivitas dari kelima subjek PPKS dalam melihat permasalahan yang ada akan menjadi basis di dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, hasil wawancara akan direduksi sebelum kemudian diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam pandangan Pulla & Carter (2018), tradisi interpretivis semacam ini akan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap subjektivitas yang ada di dalam kehidupan manusia. Lewat wawancara kualitatif yang dilakukan oleh Tim KKN-PPM dan Pemerintah Desa Sidoharjo inilah tradisi interpretivis menjadi relevan untuk memahami kompleksitas di dalam kehidupan para subjek PPKS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan belumlah menjadi agenda arus utama di Desa Sidoharjo. Temuan ini didasarkan pada belum tercapainya tiga poin SDGs yang signifikan bagi penyandang disabilitas, yakni kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3); pendidikan berkualitas (SDG 4); dan pengurangan kesenjangan (SDG 10). Tabel 3 merupakan hasil wawancara yang mampu menunjukkan kondisi dan kebutuhan kelima subjek PPKS di Desa Sidoharjo dalam kaitannya dengan pemenuhan tiga poin SDGs di atas.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kelima subjek PPKS sama-sama belum terdaftar di dalam DTKS. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana bantuan sosial khusus bagi PPKS tidak terdistribusi. Selain itu, pemerintah juga belum mengintervensi kelima subjek PPKS terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3). Pertanyaan yang diajukan terkait dengan pemenuhan SDG 3 adalah mengenai kondisi sosial-ekonomi, tempat tinggal, serta pelayanan dan asistensi kesehatan yang pernah diterima. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelima subjek tidak pernah mendapatkan intervensi (pelayanan dan asistensi kesehatan) dari pemerintah. Selain itu, wawancara yang telah dilakukan juga menunjukkan adanya urgensi untuk memberikan pendampingan pembuatan KTP kepada subjek A, B, dan C. Kepemilikan KTP akan mendukung subjek di dalam memperoleh hak sosial, ekonomi, dan politiknya. Pendampingan sangat diperlukan mengingat subjek PPKS merupakan penyandang disabilitas sensorik (subjek A) dan disabilitas ganda (subjek B dan C). Pendampingan pembuatan KTP sangatlah mungkin mengingat Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki layanan "Jemput Bola", sebuah layanan di mana petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten akan mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman KTP (Kominfo, 2019). Kepemilikan KTP akan mendukung implementasi SDG 10, yakni pengurangan kesenjangan.

Sementara itu, pemenuhan SDG 4 menjadi kendala bagi subjek A dan E. Keduanya merupakan anak usia sekolah yang membutuhkan akses ke layanan pendidikan khusus. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi menyebabkan keduanya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Selain itu, pelatihan keterampilan juga dibutuhkan bagi subjek A dan E. Dari kelima subjek, kondisi fisik dan mental dari subjek A dan E masih mendukung adanya pelatihan keterampilan nonformal. Subjek E, misalnya, telah diberikan pelatihan vokasional oleh keluarganya berupa pengembangan dagangan. Meskipun demikian, hasil wawancara menemukan bahwa belum ada intervensi pemerintah terkait dengan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.

Selain menemukan fakta aktual mengenai kondisi dan kebutuhan lima subjek PPKS di Desa Sidoharjo, wawancara ini juga mampu mendekatkan Pemerintah Desa Sidoharjo dengan subjek PPKS. Data-data hasil wawancara telah dimasukkan ke dalam "Form Asesmen Terintegrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial". Temuan yang berupa kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk kemudian memberikan dampak positif bagi kehidupan kelima subjek PPKS ini. Keberadaan Tim KKN-PPM di Desa Sidoharjo secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi bagi pemerolehan informasi mengenai penyandang disabilitas. Proses wawancara mendalam antara keluarga dan Tim KKN-PPM telah menyadarkan keluarga dan pemerintah desa atas pentingnya pemenuhan

terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, keberadaan Tim KKN-PPM juga mampu menjembatani kebutuhan penyandang disabilitas dengan komitmen Pemerintah Desa Sidoharjo untuk mewujudkannya.

Tabel 3. Hasil wawancara kualitatif dengan lima subjek PPKS

Subjek PPKS	SDG	Hasil Wawancara	Reduksi Data
A	SDG 3	Disebutkan bahwa subjek PPKS belum terdata di dalam DTKS. Akibatnya subjek tidak memperoleh bantuan pemerintah khusus untuk PPKS.	Subjek PPKS perlu untuk terdaftar di dalam DTKS dan memiliki KTP. Subjek juga membutuhkan intervensi pemerintah berupa akses ke layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas (tuna netra).
	SDG 4	Subjek memiliki minat yang besar untuk meneruskan pendidikan. Akan tetapi, tidak adanya intervensi dari pemerintah dan kondisi ekonomi menyebabkan kebutuhan subjek atas pendidikan terhalang.	
	SDG 10	Subjek PPKS tidak memiliki KTP meskipun secara legal sudah berhak untuk memilikinya. Akibatnya subjek tidak mampu mendapatkan privilese sosial, ekonomi, dan politik dari kepemilikan KTP.	
B	SDG 3	Subjek PPKS tidak mendapatkan asistensi kesehatan dari pemerintah. Semua akses menuju layanan kesehatan diperoleh secara mandiri terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Subjek juga belum terdaftar di dalam DTKS.	Subjek perlu membutuhkan intervensi pemerintah berupa akses ke layanan kesehatan yang kontinu. Subjek PPKS juga perlu untuk terdaftar di dalam DTKS dan memiliki KTP.
	SDG 4	Kondisi fisik dan mental dari subjek PPKS memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan formal maupun nonformal.	
	SDG 10	Subjek PPKS tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) meskipun secara legal sudah berhak untuk memilikinya. Akibatnya subjek tidak mampu mendapatkan privilese sosial, ekonomi, dan politik dari kepemilikan KTP.	
C	SDG 3	Subjek PPKS tidak mendapatkan asistensi kesehatan dari pemerintah. Semua akses menuju layanan kesehatan diperoleh secara mandiri terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Subjek juga belum terdaftar di dalam DTKS.	Subjek perlu membutuhkan intervensi pemerintah berupa akses ke layanan kesehatan yang kontinu. Subjek PPKS juga perlu untuk terdaftar di dalam DTKS dan memiliki KTP.
	SDG 4	Kondisi fisik dan mental dari subjek PPKS memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan formal maupun nonformal.	
	SDG 10	Subjek PPKS tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) meskipun secara legal sudah berhak untuk memilikinya. Akibatnya subjek tidak mampu mendapatkan privilese sosial, ekonomi, dan politik dari kepemilikan KTP.	
D	SDG 3	Subjek PPKS yang merupakan korban pelecehan seksual tidak memperoleh layanan konseling secara kontinu. Subjek juga belum terdaftar di dalam DTKS.	Subjek PPKS juga perlu untuk terdaftar di dalam DTKS
	SDG 4	Kondisi mental dari subjek PPKS memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan formal maupun nonformal.	
	SDG 10	Subjek membutuhkan intervensi pemerintah guna memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.	
E	SDG 3	Disebutkan bahwa subjek PPKS belum terdaftar di DTKS. Akibatnya subjek tidak memperoleh bantuan pemerintah khusus untuk PPKS.	Subjek PPKS juga perlu untuk terdaftar di dalam DTKS. Subjek juga membutuhkan intervensi pemerintah berupa akses ke layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas (tuna netra).
	SDG 4	Subjek merupakan anak usia sekolah tetapi tidak memiliki akses ke pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas netra. Tidak adanya intervensi dari pemerintah dan kondisi ekonomi menyebabkan kebutuhan subjek atas pendidikan terhalang.	
	SDG 10	Subjek membutuhkan intervensi pemerintah guna memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.	

Pemetaan masalah berdasarkan pemenuhan tiga poin SDGs di atas membawa pada beberapa tawaran solusi yang potensial untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo maupun institusi pemerintah lainnya. Pertama, pemerintah desa dapat menggunakan “Form Asesmen Terintegrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial” sebagai basis di dalam memahami kondisi dan kebutuhan aktual para subjek PPKS. Dengan demikian, program pemberdayaan maupun asistensi dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Kedua, pemerintah sebaiknya menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak keluarga subjek PPKS. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama mengenai keberadaan penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo adalah tidak adanya intervensi pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif antara Pemerintah Desa Sidoharjo dan pihak keluarga subjek PPKS dapat menjadi langkah awal untuk merespons permasalahan ini.

Selain kedua tawaran solusi tersebut, Pemerintah Desa Sidoharjo juga perlu untuk merepresentasikan keberadaan penyandang disabilitas, baik di tataran penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan desa. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutsertakan suara penyandang disabilitas di dalam diskusi (*“rembug desa”*), program dialog multi-stakeholder, maupun di dalam implementasi agenda pembangunan itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo belumlah ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurang sensitifnya pemerintah di dalam mendapatkan informasi aktual mengenai kondisi dan kebutuhan aktual dari penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo. Hasil wawancara kualitatif yang dilakukan oleh Tim KKN-PPM UGM dan Pemerintah Desa Sidoharjo kemudian dapat menjadi basis di dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan di Desa Sidoharjo. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan yang merekognisi keberadaan penyandang disabilitas. Lima penyandang disabilitas atau subjek PPKS yang telah diwawancarai merupakan sampel yang representatif untuk memperjelas urgensi Pemerintah Desa Sidoharjo untuk mengedepankan nilai-nilai inklusivitas di dalam agenda pembangunan desa. Melaluinya pemerintah dapat menindaklanjuti kebutuhan aktual dari masing-masing penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo. Penelitian ini semakin menegaskan bahwa pengarusutamaan penyandang disabilitas di dalam agenda pembangunan hanya dapat terjadi apabila proses diskusi hingga implementasi program-program desa dilakukan secara representatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat langsung di dalam program KKN-PPM JT241: Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Kepala dan Perangkat Desa Sidoarjo, dan para narasumber penelitian. Secara khusus penulis juga berterima kasih kepada Tim KKN-PPM UGM Desa Sidoharjo 2023: Muhammad Fariz Daffa; Citra Aulia Mahardini Gunawan; Aldila Lutfiah Mantofani; Muhammad Fahrozi; Indrawan Putra Perdana; Firda Auli Zelinda Rohma; Arinal Husna; Raihan Khrisna Amalia; Oktaviona Kartikasari; Bintang Kumarasakti; Risa Nur Rahmawati; dan Irvan Danil Putra.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (n.d.). Sekilas SDGs. [https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=TPB%2FSDGs%20merupakan%20komitmen%20global,Bersih%20dan%20Terjangkau%3B%20\(8\).](https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=TPB%2FSDGs%20merupakan%20komitmen%20global,Bersih%20dan%20Terjangkau%3B%20(8).)
- Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). #Envision2030: 17 Goals To Transform The World For Persons With Disabilities. *United Nations*. <https://social.desa.un.org/issues/disability/envision-2030/17goals-pwds#:~:text=The%20SDGs%20also%20explicitly%20include,the%20monitoring%20of%20the%20SDGs.>

- Diskominfo Jateng. (2022, September 19). Kunjungi Desa Ramah Disabilitas di Klaten, Ganjar Siap Bantu. *PORTAL BERITA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. <https://jatengprov.go.id/publik/kunjungi-desa-ramah-disabilitas-di-klaten-ganjar-siap-bantu/>.
- Ghufron, M. (2022, December). Hak-Hak Disabilitas. *BAKTI NEWS*. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hak-hak-disabilitas>.
- Kementerian Sosial. (n.d.). Pengetahuan PPKS dan PSKS. https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf.
- Kominfo. (2019, August 19). Layanan Jemput Bola, Warga Disabilitas Dilakukan Rekam KTP Di Desa. *Website Pemkab Klaten*. <https://klatenkab.go.id/layanan-jemput-bola-warga-disabilitas-dilakukan-rekam-ktp-di-desa/>.
- Kominfo. (2022, December 22). Pemerintah Kabupaten Klaten Raih Anugerah Prakarsa Inklusi. *Website Pemkab Klaten*. <https://klatenkab.go.id/pemerintah-kabupaten-klaten-raih-anugerah-prakarsa-inklusi/>.
- Mahadi. (2021). Introduction. In A. Mahadi & N. Zhafri (Eds.). *Making SDGs Matter: Leaving No One Behind* (pp. 1–12). Institute of Strategic and International Studies.
- Pulla, V., & Carter, E. (2018). Employing Interpretivism in Social Work Research. *International Journal of Social Work and Human Services Practice*, 6(1), 9-14. <http://dx.doi.org/10.13189/ijrh.2018.060102>.
- Rahadi, F. (2022, December 23). Hari Disabilitas Internasional, Bupati Klaten-Camat Polanharjo Terima Prakarsa Inklusi. *Republika*. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rnbqq1291/hari-disabilitas-internasional-bupati-klatencaImat-polanharjo-terima-prakarsa-inklusi>.
- Sheppard, V. (2020). *Research Methods for the Social Sciences: An Introduction*. British Columbia.